



**RENCANA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep merupakan Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika; pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan komunikasi dan Informasi serta telekomunikasi dan aplikasi telematika; pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan komunikasi dan informatika; pelaksanaan hubungan kerja sama dengan insan pers, dan media dalam memperluas jaringan informasi; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan komunikasi dan informasi serta telekomunikasi, dan aplikasi telematika; pelaksanaan pengamanan informasi daerah dan penyediaan data statistik daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah dokumen perencanaan tahunan PD yang merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2024 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada yang merupakan tahun keempat dalam pencapaian Visi Kabupaten Sumenep pada tahun 2024.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep), yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 dan diharapkan RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2024 akan berperan sebagai tahapan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026. Maksud dari penyusunan RPJMD ini adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah selama lima tahun, sehingga dapat memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan Daerah. Dalam RPJMD juga dijelaskan tentang tujuan penyusunan RPJMD antara lain untuk memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Tujuan ini yang menjadi penjabaran dalam rencana kerja tahun 2024 agar terwujud sinergitas, pembangunan terpadu dan berkesinambungan.

c. Rencana Kerja PD

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Rencana Kerja PD yang definitif. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada Rencana Strategis (renstra) 2021-2026 PD yang digunakan sebagai acuan perumusan program kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja PD tahun 2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026.
2. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran

renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;

3. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada tahun sebelumnya, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Rencana Kerja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
4. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan PD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja PD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Sinkronisasi yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan Provinsi maupun Pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dana kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional yang mencakup semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan sasaran serta target pembangunan diberbagai aspek dan wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal disetiap wilayah pembangunan.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam rangka Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

#### b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dengan mempertimbangkan data yang telah diinventarisir, permasalahan dan potensi yang ada. Sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan di Kabupaten Sumenep.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen PD, Renstra PD, dengan Renja KIL, dan Renja PD provinsi, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD, landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja PD, sistematika penulisan susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD**

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi PD.

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengkaji terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, perumusan tujuan dan sasaran PD yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan prioritas pembangunan.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2022 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2022 dan perkiraan capaian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.1  
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN  
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun Berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2026		Catatan			
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5) %	8	9	10 = (9/4) %	11			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah	100 persen	80 persen	80 persen	100%	90 persen	90 persen	90%		
2	16	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah	100 persen	80 persen	80 persen	100%	90 persen	90 persen	90%	
2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	16	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah	100 persen	75 persen	75 persen	100%	85 persen	85 persen	85%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun Berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2026		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5) %	8	9	10 = (9/4) %	11
2	16	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	80%	
2	16	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%	
2	16	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	15 dokumen	15 dokumen	88%	
2	16	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 dokumen	240 dokumen	240 dokumen	100%	240 dokumen	240 dokumen	96%	
2	16	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah	100 persen	80 persen	80 persen	100%	90 persen	90 persen	90%	
2	16	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%	

Kode					Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun Berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2026		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5) %	8	9	10 = (9/4) %	11
2	16	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah	100 persen	80 persen	80 persen	100%	90 persen	90 persen	90%	
2	16	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
2	16	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	67%	
2	16	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah	100 persen	80 persen	80 persen	100%	90 persen	90 persen	90%	
2	16	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	15 unit	60%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun Berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2026		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5) %	8	9	10 = (9/4) %	11
2	16	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%	
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terpenuhinya Informasi dan Komunikasi Publik	95 persen	85 persen	85 persen	100%	95 persen	95 persen	100%	
2	16	2	02.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Informasi Dan komunikasi Publik	95 dokumen	95 dokumen	95 dokumen	100%	95 dokumen	95 dokumen	100%	
2	16	2	02.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	50 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100%	40 dokumen	40 dokumen	80%	
2	16	2	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	50 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100%	40 dokumen	40 dokumen	80%	
2	16	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	95 dokumen	90 dokumen	90 dokumen	100%	90 dokumen	90 dokumen	95%	
2	16	2	02.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	45 media	45 media	45 media	100%	45 media	45 media	100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun Berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2026		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5) %	8	9	10 = (9/4) %	11
2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	95 dokumen	95 dokumen	95 dokumen	100%	95 dokumen	95 dokumen	100%	
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	50 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100%	40 dokumen	40 dokumen	80%	
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan sistem jaringan pemerintah daerah	95 persen	85 persen	85 persen	100%	95 persen	95 persen	100%	
2	16	3	02.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Instansi yang terhubung jaringan internet	75 instansi	70 instansi	70 instansi	100%	70 instansi	70 instansi	100%	
2	16	3	02.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75 instansi	70 instansi	70 instansi	100%	70 instansi	70 instansi	100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun Berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2026		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5) %	8	9	10 = (9/4) %	11
					Daerah									
2	16	3	02.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan E Gov di lingkup Pemerintah Daerah	95 persen	90 persen	90 persen	100%	90 persen	90 persen	95%	
2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	75 data	70 data	70 data	100%	70 data	70 data	93%	
2	16	3	02.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	45 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100%	40 dokumen	40 dokumen	89%	
2	16	3	02.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	75 instansi	70 instansi	70 instansi	100%	70 instansi	70 instansi	93%	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemenuhan Data Statistik Daerah	75 persen	70 persen	70 persen	100%	75 persen	75 persen	100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun Berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2026		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5) %	8	9	10 = (9/4) %	11
2	20	2	02.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya data Statistik Daerah	100 dokumen	90 dokumen	90 dokumen	100%	90 dokumen	90 dokumen	90%	
2	20	2	02.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	100 dokumen	90 dokumen	90 dokumen	100%	90 dokumen	90 dokumen	90%	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan sandi daerah	70 persen	60 persen	60 persen	100%	70 persen	70 persen	100%	
2	21	2	02.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya keamanan Sandi Daerah	100 dokumen	90 dokumen	90 dokumen	100%	90 dokumen	90 dokumen	90%	
2	21	2	02.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100 dokumen	90 dokumen	90 dokumen	100%	90 dokumen	90 dokumen	90%	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2022 untuk memenuhi apa yang sudah ditargetkan dalam Renstra maupun RPJMD Kabupaten Sumenep sebagaimana pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah tidak ada.

2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan/Sub Kegiatan

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.

- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 4 paket dari target 4 paket pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.

- b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 2 paket dari target 2 paket pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.

- c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 17 dokumen dari target 17 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.

- d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 250 dokumen dari target 250 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.



- 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 6 unit dari target 6 unit pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
  - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
    - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 10 unit dari target 10 unit pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
  - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 15 unit dari target 15 unit pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
    - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 6 unit dari target 6 unit pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 40 dokumen dari target 40 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
    - b) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 40 dokumen dari target 40 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
    - c) Pelayanan Informasi Publik, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 90 dokumen dari target 90 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.

- d) Layanan Hubungan Media, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 45 media dari target 45 media pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
  - e) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 95 dokumen dari target 95 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
  - f) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 40 dokumen dari target 40 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 70 instansi dari target 70 instansi pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
  - 2) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 70 data dari target 70 data pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
    - b) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 40 dokumen dari target 40 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
    - c) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 70 instansi dari target 70 instansi pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 90 dokumen dari

target 90 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.

e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini dapat terealisasi sebesar 90 dokumen dari target 90 dokumen pada rencana kerja, sehingga tercapai 100%.

a) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2023 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;

Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan masih belum ada yang melebihi target.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2023;

- Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep untuk tahun 2023 adalah tidak ada.

- Faktor terpenuhinya target Kinerja program / kegiatan adalah kekompakan, kreatifitas dan inovasi SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

SDM Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2023;

- Faktor yang akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2023 adalah force majeure berupa kejadian-kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah melaksanakan koordinasi dengan PD terkait secara ceat dan berkelanjutan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pada era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, Good Government tata pemerintahan yang baik, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu dengan semakin ketatnya persaingan global, menuntut semua institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan Good Governance. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep selalu melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya good governance melalui e-Government. Melalui e-government, masyarakat akan semakin mudah berinteraksi dengan satuan-satuan dalam pemerintahan sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan pelayanan publik yang terbuka dan demokratis. Hal tersebut sejalan dengan konsep pengembangan e-government yang sangat erat kaitannya dengan konsep keterbukaan atau transparansi.

Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep selama lima tahun sebelumnya, tertuang dalam Renstra tahun 2021 – 2026, target SPM, IKK dan MDGs tercantum pada table 2.2 berikut:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sumenep

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/ Nilai Target/ Standard (IKU, SPM, IKK)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	98 persen	77 persen	82 persen	87 persen	92 persen	98 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik	95 persen	75 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3	Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Dengan Baik	95 persen	75 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
4	Persentase Persediaan Data sektoral Terpadu	95 persen	75 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya target realisasi nilai SAKIP sebesar 81,29 serta Sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 88,04% pada tahun 2022;
2. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah kurangnya fasilitas Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan dan menyegarkan pengetahuan manajerial dan ketrampilan teknis SDM;
3. Dampak menurunnya target kinerja tersebut mengakibatkan:
  - a. Belum meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada masyarakat sehingga tidak dapat mengetahui dan memahami serta tidak ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
  - b. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yang belum memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok PD yang merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program;
  - c. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang masih kurang terhadap teknologi informasi sehingga kurang mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat.
4. Tantangan untuk tetap memaksimalkan capaian kinerja adalah memaksimalkan sumber daya berupa jaringan digital dan meningkatkan pengetahuan warga masyarakat untuk tetap ikut serta dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep melalui media sosial.
5. Program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyediaan wi-fi gratis yang termuat pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari:

- a. Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, yaitu karena masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi.
- b. Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sumenep serta RPJMD 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu:
  - 1) Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
  - 2) Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program;
  - 3) Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.
- c. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran
  - 1) Tujuan  
Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government.
  - 2) Sasaran
    - a) Meningkatnya Jumlah kebijakan tata kelola Keamanan Informasi dan operasional Jaring komunikasi sandi;
    - b) Meningkatnya jumlah layanan publik yang menerapkan sistem berbasis elektronik;

- c) Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
  - d) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik daerah.
- 3) Indikator Sasaran
- a) Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
  - b) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
  - c) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik;
  - d) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
  - e) Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;
  - f) Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - g) Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan;
  - h) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - i) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
  - j) Jumlah konten yang dikelola oleh perangkat daerah;
  - k) Jumlah Layanan Hubungan Media;
  - l) Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - m) Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola;
  - n) Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - o) Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - p) Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);



- q) Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- r) Jumlah perangkat daerah yang sudah memiliki nama domain;
- s) Jumlah perangkat daerah yang sudah mempunyai admin dalam menunjang one data kabupaten;
- t) Jumlah perangkat daerah yang sudah terhubung layanan pemerintah;
- u) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

#### 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024. Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Sumenep

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90%	7.614.511.680	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90%	7.614.511.680	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	90%	5.760.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	90%	5.760.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersedia	10 dokumen	5.760.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersedia	10 dokumen	5.760.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah	100%	6.207.297.388	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah	100%	6.207.297.388	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	6.207.297.388	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumenep	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	6.207.297.388	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	94.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	94.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	90 stel	45.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumenep	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	90 stel	45.000.000	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan pemulangan pegawai yang pensiun	100%	9.000.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan pemulangan pegawai yang pensiun	100%	9.000.000	
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan pegawai yang meninggal	100%	5.000.000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan pegawai yang meninggal	100%	5.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai yang diikuti	5 diklat	35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sumenep	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai yang diikuti	5 diklat	35.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	80%	523.416.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	80%	523.416.400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	9.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	9.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya bahan logistik kantor	1 tahun	304.853.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya bahan logistik kantor	1 tahun	304.853.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	61.320.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sumenep	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	61.320.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	33.480.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumenep	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	33.480.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang dapat diikuti	1 tahun	104.263.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumenep	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang dapat diikuti	1 tahun	104.263.400	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan pengadaan barang perangkat daerah	90%	287.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan pengadaan barang perangkat daerah	90%	287.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Terlaksananya pengadaan mebel	1 paket	12.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sumenep	Terlaksananya pengadaan mebel	1 paket	12.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	75.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 paket	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 paket	200.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan jasa penunjang perangkat daerah	80%	216.337.892	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan jasa penunjang perangkat daerah	80%	216.337.892	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	122.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumenep	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	122.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	64.337.892	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	64.337.892	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor berupa dekorasi, dokumentasi dan publikasi hari-hari besar	1 tahun	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumenep	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor berupa dekorasi, dokumentasi dan publikasi hari-hari besar	1 tahun	30.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik perangkat daerah	80%	280.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik perangkat daerah	80%	280.700.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kab. Sumenep	Tersedianya jasa pemeliharaan, bahan bakar, dan pajak kendaraan dinas perangkat daerah	1 tahun	140.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kab. Sumenep	Tersedianya jasa pemeliharaan, bahan bakar, dan pajak kendaraan dinas perangkat daerah	1 tahun	140.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kendaraan Dinas Jabatan					Kendaraan Dinas Jabatan					
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Terlaksananya pemeliharaan mebel perangkat daerah	1 tahun	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sumenep	Terlaksananya pemeliharaan mebel perangkat daerah	1 tahun	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sumenep	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	125.000.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan layanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	90%	6.880.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Sumenep	persentase pemenuhan layanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	90%	6.880.000.000	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah media pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota yang tersedia	4 media	6.880.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah media pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota yang tersedia	4 media	6.880.000.000	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi/pengaduan publik yang tersedia	12 dokumen	350.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi/pengaduan publik yang tersedia	12 dokumen	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Sumenep	Jumlah konten dan dokumen perencanaan media komunikasi publik yang tersedia	48 konten	250.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Sumenep	Jumlah konten dan dokumen perencanaan media komunikasi publik yang tersedia	48 konten	250.000.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Sumenep	Jumlah kanal media komunikasi publik yang terkelola	5 kanal	300.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Sumenep	Jumlah kanal media komunikasi publik yang terkelola	5 kanal	300.000.000	
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Sumenep	persentase permintaan informasi publik yang terpenuhi	80%	250.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Sumenep	persentase permintaan informasi publik yang terpenuhi	80%	250.000.000	
	Layanan Hubungan Media	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen kerjasama dengan media yang terlaksana	90 media	4.000.000.000	Layanan Hubungan Media	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen kerjasama dengan media yang terlaksana	90 media	4.000.000.000	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Sumenep	persentase sengketa informasi yang terselesaikan	90%	1.500.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Sumenep	persentase sengketa informasi yang terselesaikan	90%	1.500.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen kemitraan dengan komunitas yang terlaksana	20 dokumen	230.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen kemitraan dengan komunitas yang terlaksana	20 dokumen	230.000.000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan sistem jaringan pemerintah daerah	80%	6.360.717.472	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan sistem jaringan pemerintah daerah	80%	6.360.717.472	
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Instansi yang memiliki nama domain pemerintah kabupaten sumenep	72 instansi	1.875.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah Instansi yang memiliki nama domain pemerintah kabupaten sumenep	72 instansi	1.875.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	72 instansi	1.875.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	72 instansi	1.875.000.000	
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Meningkatnya layanan sistem jaringan internet dilingkup pemerintah daerah	80%	4.485.717.472	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Meningkatnya layanan sistem jaringan internet dilingkup pemerintah daerah	80%	4.485.717.472	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	3 unit server	273.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	3 unit server	273.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	2 dokumen	462.717.472	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	2 dokumen	462.717.472	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Sumenep	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	76 instansi	3.750.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Sumenep	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	76 instansi	3.750.000.000	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan data statistik daerah	80%	905.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Sumenep	Persentase pemenuhan data statistik daerah	80%	905.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase data statistik daerah yang terpenuhi	80%	905.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase data statistik daerah yang terpenuhi	80%	905.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen statistik yang tersiapkan (sumenep dalam angka dan kecamatan dalam angka)	1 dokumen	115.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Sumenep	Jumlah dokumen statistik yang tersiapkan (sumenep dalam angka dan kecamatan dalam angka)	1 dokumen	115.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan statistik sektoral	1 pegawai	180.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan statistik sektoral	1 pegawai	180.000.000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Sumenep	Jumlah sistem data yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah (satu data)	1 sistem data	150.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Sumenep	Jumlah sistem data yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah (satu data)	1 sistem data	150.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Sumenep	Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan statistik sektoral	1 lembaga	180.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Sumenep	Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan statistik sektoral	1 lembaga	180.000.000	
	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Sumenep	Jumlah aplikasi statistik sektoral yang sudah berjalan	1 aplikasi	100.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Sumenep	Jumlah aplikasi statistik sektoral yang sudah berjalan	1 aplikasi	100.000.000	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	1 data	180.000.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Sumenep	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	1 data	180.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Sumenep	Persentase pengamanan sandi daerah	80%	1.589.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Sumenep	Persentase pengamanan sandi daerah	80%	1.589.000.000	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase pengamanan sandi daerah yang terselenggara	80%	1.589.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Persentase pengamanan sandi daerah yang terselenggara	80%	1.589.000.000	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah kebijakan/peraturan penyelenggara persandian dan pengamanan informasi	2 kebijakan	205.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah kebijakan/peraturan penyelenggara persandian dan pengamanan informasi	2 kebijakan	205.000.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan CSIRT (computer security incident response team)	62 instansi	1.197.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan CSIRT (computer security incident response team)	62 instansi	1.197.000.000	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	62 instansi	187.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumenep	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	62 instansi	187.000.000	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musyararah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dari hasil reviu terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, diperoleh beberapa usulan dari masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme musrenbang desa dan kecamatan.

Tabel 2.4  
 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada  
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

N I H I L

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PD**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/ sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan  
Kabupaten Sumenep Tahun 2024

No	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sumenep
1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.	Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib damai dan Bersatu.
3	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.	Memperkuat tata kelolapemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
5	Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan

	Pelayanan Dasar.		berkelanjutan.
6	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	
7	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.	

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format sebagai berikut:



Tabel 3.1  
Prioritas dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	1. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government	a. Indeks SPBE b. Nilai SAKIP c. Nilai IKM d. Indeks Profesionalisme Aparatur e. Opini atas Audit BPK f. Tingkat Maturitas SPIP	Meningkatnya Jumlah kebijakan tata kelola Keamanan Informasi dan operasional Jaring komunikasi sandi;  Meningkatnya jumlah layanan publik yang menerapkan sistem berbasis elektronik;  Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;  Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik daerah.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD tahun 2024
1	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif Berbasis E-Government	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik	85%

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Sasaran PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD tahun 2024
1	Meningkatnya jumlah kebijakan tata kelola Keamanan Informasi dan operasional Jaring komunikasi sandi	Persentase PD yang masuk dalam tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi	87%
2	Meningkatnya jumlah layanan publik yang menerapkan sistem berbasis elektronik	Persentase layanan publik yang menerapkan sistem berbasis elektronik	85%
3	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85%
4	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik daerah	Persentase pemanfaatan data dan informasi statistic daerah	85%

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama PD sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.4  
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e-Government	Indeks SPBE	2,2
2	Meningkatnya kualitas Implementasi SPBE	Persentase data hasil pembangunan yang akurat	80%
3	Meningkatnya pengamanan informasi daerah	Persentase peningkatan keamanan sistem informasi daerah	80%

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

#### 4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi tujuan organisasi untuk mendanai 3 urusan pemerintahan, 5 Program, 13 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
  - a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - f) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - g) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - h) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - b) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - d) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - e) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - f) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - g) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - b) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - c) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - e) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - f) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun
  - g) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
  - h) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN

- i) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - j) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - k) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - h) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - j) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - k) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
  - d) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  - e) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - f) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - g) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - h) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud

- i) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - j) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - k) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - f) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - g) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - h) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - i) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - j) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - k) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- l) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
- b. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
  - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
    - b) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
    - c) Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
    - d) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - e) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - f) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
    - g) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
    - h) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
    - i) Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis
    - j) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
    - k) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
    - l) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
    - m) Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - c. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
    - 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
    - 2) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah



- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

## 2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

### a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
  - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
  - c) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
  - d) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - e) Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
  - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

## 3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

### a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - c) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## 4.2 Pendanaan PD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mengampu Urusan pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Adapun Rencana Kerja dan pendanaan PD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep  
tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kab. Sumenep	90%	7.614.511.680	APBD	-	90%	8.375.962.848
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Kab. Sumenep	90%	5.760.000	APBD	-	90%	6.336.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersedia	Kab. Sumenep	10 dokumen	5.760.000	APBD	-	10 dokumen	6.336.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Perangkat Daerah	Kab. Sumenep	100%	6.207.297.388	APBD	-	100%	6.828.027.127
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sumenep	1 tahun	6.207.297.388	APBD	-	1 tahun	6.828.027.127
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat	Kab. Sumenep	100%	94.000.000	APBD	-	100%	103.400.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		daerah							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Kab. Sumenep	90 stel	45.000.000	APBD	-	90 stel	49.500.000
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	persentase pemenuhan pemulangan pegawai yang pensiun	Kab. Sumenep	100%	9.000.000	APBD	-	100%	9.900.000
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	persentase pemenuhan pegawai yang meninggal	Kab. Sumenep	100%	5.000.000	APBD	-	100%	5.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai yang diikuti	Kab. Sumenep	5 diklat	35.000.000	APBD	-	5 diklat	38.500.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Sumenep	80%	523.416.400	APBD	-	80%	575.758.040
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sumenep	1 tahun	9.500.000	APBD	-	1 tahun	10.450.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sumenep	1 tahun	10.000.000	APBD	-	1 tahun	11.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kab. Sumenep	1 tahun	304.853.000	APBD	-	1 tahun	335.338.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan	Kab. Sumenep	1 tahun	61.320.000	APBD	-	1 tahun	67.452.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		penggandaan							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sumenep	1 tahun	33.480.000	APBD	-	1 tahun	36.828.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang dapat diikuti	Kab. Sumenep	1 tahun	104.263.400	APBD	-	1 tahun	114.689.740
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang perangkat daerah	Kab. Sumenep	90%	287.000.000	APBD	-	90%	315.700.000
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	Kab. Sumenep	1 paket	12.000.000	APBD	-	1 paket	13.200.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Sumenep	1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	82.500.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Sumenep	3 paket	200.000.000	APBD	-	3 paket	220.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang perangkat daerah	Kab. Sumenep	80%	216.337.892	APBD	-	80%	237.971.681
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sumenep	1 tahun	122.000.000	APBD	-	1 tahun	134.200.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sumenep	1 tahun	64.337.892	APBD	-	1 tahun	70.771.681
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor berupa dekorasi, dokumentasi dan publikasi hari-hari besar	Kab. Sumenep	1 tahun	30.000.000	APBD	-	1 tahun	33.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik perangkat daerah	Kab. Sumenep	80%	280.700.000	APBD	-	80%	308.770.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, bahan bakar, dan pajak kendaraan dinas perangkat daerah	Kab. Sumenep	1 tahun	140.700.000	APBD	-	1 tahun	154.770.000
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel perangkat daerah	Kab. Sumenep	1 tahun	15.000.000	APBD	-	1 tahun	16.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Sumenep	1 tahun	125.000.000	APBD	-	1 tahun	137.500.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase pemenuhan layanan pengelolaan informasi dan komunikasi	Kab. Sumenep	90%	6.880.000.000	APBD	-	90%	7.568.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		publik							
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Sumenep	4 media	6.880.000.000	APBD	-	4 media	7.568.000.000
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi/pengaduan publik yang tersedia	Kab. Sumenep	12 dokumen	350.000.000	APBD	-	12 dokumen	385.000.000
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten dan dokumen perencanaan media komunikasi publik yang tersedia	Kab. Sumenep	48 konten	250.000.000	APBD	-	48 konten	275.000.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kanal media komunikasi publik yang terkelola	Kab. Sumenep	5 kanal	300.000.000	APBD	-	5 kanal	330.000.000
	Pelayanan Informasi Publik	persentase permintaan informasi publik yang terpenuhi	Kab. Sumenep	80%	250.000.000	APBD	-	80%	275.000.000
	Layanan Hubungan Media	Jumlah dokumen kerjasama dengan media yang terlaksana	Kab. Sumenep	90 media	4.000.000.000	APBD	-	90 media	4.400.000.000
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	persentase sengketa informasi yang	Kab. Sumenep	90%	1.500.000.000	APBD	-	90%	1.650.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		terselesaikan							
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan komunitas yang terlaksana	Kab. Sumenep	20 dokumen	230.000.000	APBD	-	20 dokumen	253.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan sistem jaringan pemerintah daerah	Kab. Sumenep	80%	6.360.717.472	APBD	-	80%	6.996.789.219
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Instansi yang memiliki nama domain pemerintah kabupaten sumenep	Kab. Sumenep	72 instansi	1.875.000.000	APBD	-	72 instansi	2.062.500.000
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Sumenep	72 instansi	1.875.000.000	APBD	-	72 instansi	2.062.500.000
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan sistem jaringan internet dilingkup pemerintah daerah	Kab. Sumenep	80%	4.485.717.472	APBD	-	80%	4.934.289.219
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	Kab. Sumenep	3 unit server	273.000.000	APBD	-	3 unit server	300.300.000
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Kab. Sumenep	2 dokumen	462.717.472	APBD	-	2 dokumen	508.989.219



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Kab. Sumenep	76 instansi	3.750.000.000	APBD	-	76 instansi	4.125.000.000
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase pemenuhan data statistik daerah	Kab. Sumenep	80%	905.000.000	APBD	-	80%	995.500.000
<b>1</b>	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik daerah yang terpenuhi	Kab. Sumenep	80%	905.000.000	APBD	-	80%	995.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik yang terarsipkan (sumenep dalam angka dan kecamatan dalam angka)	Kab. Sumenep	1 dokumen	115.000.000	APBD	-	1 dokumen	126.500.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan statistik sektoral	Kab. Sumenep	1 pegawai	180.000.000	APBD	-	1 pegawai	198.000.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah sistem data yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah (satu data)	Kab. Sumenep	1 sistem data	150.000.000	APBD	-	1 sistem data	165.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan statistik sektoral	Kab. Sumenep	1 lembaga	180.000.000	APBD	-	1 lembaga	198.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah aplikasi statistik sektoral yang sudah berjalan	Kab. Sumenep	1 aplikasi	100.000.000	APBD	-	1 aplikasi	110.000.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Kab. Sumenep	1 data	180.000.000	APBD	-	1 data	198.000.000
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>								
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengamanan sandi daerah yang terselenggara</b>	<b>Kab. Sumenep</b>	<b>80%</b>	<b>1.589.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>	<b>1.747.900.000</b>
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/peraturan penyelenggara persandian dan pengamanan informasi	Kab. Sumenep	2 kebijakan	205.000.000	APBD	-	2 kebijakan	225.500.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan CSIRT (computer security incident response team)	Kab. Sumenep	62 instansi	1.197.000.000	APBD	-	62 instansi	1.316.700.000
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Kab. Sumenep	62 instansi	187.000.000	APBD	-	62 instansi	205.700.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan pada 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian pada tahun 2024 mendatang.

Rencana Kerja ini disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

#### **5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran**

Program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep atau sumber dana lain yang dapat memacu terjalannya koordinasi dalam mengendalikan kebijakan pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian.

#### **5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Secara umum kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku:

1. Sustainable Development Goals (SDGs);
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

#### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep serta dukungan dari pimpinan eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan rencana kerja untuk melaksanakan kewenangan pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Adanya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

(Sustainable Development) di Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja;
2. Diperlukan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga dapat terwujud mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya yang makin intens dapat dilakukan melalui Pendidikan formal, pembinaan teknis, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang lebih signifikan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi dan teknis dalam lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;
5. Perlu peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan hal-hal teknis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai sarana evaluasi peningkatan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 22 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sumenep

**FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH.**  
NIP. 19680227 199703 1 005